

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.W. Widjaja, *Etika Administrasi Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Agung kurniawan, *transformasi pelayanan publik, pembaruan*, Yogyakarta, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Koentjaraningrat dalam H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993)
- Satjipto rahardjo, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, genta publishing, yogyakarta, 2009

- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
- Sarwoto, Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen, ghala Indonesia, Jakarta, 1990,
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Penegakan hukum, Bina Cipta, Bandung 1983.
- Widjaya, Amin Tunggal, Manajemen suatu pengantar cetakan pertama, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993
- W. J. S, Poerwadrninta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawaji Press, Jakarta, 2017.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Perda Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, Buku I Prioritas Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.

### C. WEBSITE

<http://infoduk.babelprov.go.id/content/peran-penting-dokumen-kependudukan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

<http://dukcapil.kemendagri.go.id/kanal/direktorat-bina-aparatur-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/perekaman-data-ktp-el-tembus-angka-9709-persen>, diakses pada tanggal 7 Januari 2019

<https://sumbar.antaranews.com/berita/196620/18477-warga-padang-belum-perekaman-ktp-elektronik.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

<http://www.ombudsman.go.id/index.php/pwk/sumatera-barat/2682-layanan-ktp-bermasalah-ombudsman-sumbar-panggil-disdukcapil-camat-se-kota-padang.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

<https://elsam.or.id/> diakses pada 14 januari 2020

### D. MAKALAH DAN JURNAL

Moh Bhayu Surya Andhika, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume V Nomor 02 Tahun 2019 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Bandung.

Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Bandung.